

# Buletin La'ó Hamutuk

Vol. 8, No. 2

Juni 2007

## Penyaringan PNTL untuk Kembali Bertugas

Sebagai bagian dari pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi-institusi publik di Timor-Leste setelah krisis 2006, sebuah proses penyaringan dijalankan untuk mengevaluasi setiap anggota Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL). Berdasarkan proses ini, tim evaluasi akan memutuskan apakah setiap mantan anggota PNTL dapat bertugas kembali atau tidak. Proses ini didasarkan pada Resolusi No. 3, yang dikeluarkan oleh Dewan Menteri pada tanggal 22 Agustus 2006.

Untuk Distrik Dili, prosesnya sudah selesai. Lebih dari 800 anggota PNTL telah bertugas kembali di bawah pengawasan UNPOL, sementara sekitar 150 anggota PNTL sedang ditunda prosesnya untuk menunggu investigasi lebih lanjut. Hingga Juni, 44 anggota PNTL yang melengkapi seluruh prosesnya dan mendapat sertifikat lengkap. Artikel ini akan membahas proses penyaringan terhadap PNTL di Dili.

### Tujuan Proses Penyaringan PNTL

Kepemimpinan PNTL di Dili pecah selama krisis yang melanda Timor-Leste pada bulan April-Mei 2006. Beberapa anggota PNTL di Dili dilaporkan terlibat dalam krisis, berpihak, dan terlibat dalam kontak senjata. Ada kontak senjata antara anggota *Falintil/Forca Defesa Timor-Leste (F-FDTL)* dan PNTL, dan beberapa anggota PNTL terbunuh. Ini sangat berdampak buruk terhadap kredibilitas dan reputasi PNTL di

mata masyarakat, yang mustahil bagi PNTL untuk melanjutkan kerjanya.

Kehancuran institusi ini adalah puncak dari berbagai persoalan yang menimpa PNTL, baik yang bersifat individual maupun institusional. Seperti yang diuraikan oleh Komisi Investigasi Internasional pada 2006, institusi PNTL sering dipolitisir oleh para pemimpinnya. Perpecahan di dalam PNTL dikarenakan latar belakang politik, pendidikan, dan sejarah (antara mantan anggota POLRI dan mantan anggota resistensi). Selain itu, secara struktural, institusi ini di bawah Kementerian Dalam Negeri, sehingga Menteri Dalam Negeri Rogerio Tiago Lobato mudah mempolitikasi institusi PNTL dan melakukan intervensi dalam berbagai operasional.

Tingkah laku beberapa anggota PNTL di lapangan dalam melakukan intervensi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi ini. Misalnya, keterlibatan beberapa anggota PNTL dalam pelecehan seksual, keterlibatan beberapa anggota PNTL dalam perdagangan gelap, dan masalah disiplin lain. Kelemahan-kelemahan ini tampak jelas dengan hancurnya markas besar PNTL selama krisis.

*La'ó Hamutuk* menemukan bahwa salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan di atas adalah proses pembentukan dan pematangan institusi ini sendiri. PNTL dibentuk oleh Pemerintah Transisi PBB (UN-TAET) pada bulan Maret 2000 sebagai bagian persiapan bagi Pemerintahan Timor-Leste. Komunitas internasional melalui berbagai kerjasama bilateral memainkan peran penting dalam pengembangan institusi dan juga pelatihan bagi PNTL. Oleh karenanya, kehancuran institusi ini menjadi sebuah pelajaran bagi semua pihak yang membantu pembentukan PNTL.

(bersambung ke halaman 2)



PNTL dan UNPOL menjaga keamanan pada Hari Pemilihan Presiden, 9 April 2007

### Daftar isi . . .

Regulasi Restrukturisasi Akvitas Perminyakan.....	6
Rencana Strategis ANTI.....	9
Janji Keadilan yang Belum Terpenuhi.....	9
50 Tahun, Timor-Leste Kehilangan Kedaulatan .....	10
Kejahatan yang memperoleh Amnesty, Di bawah UU Amnesti.....	12
UU Amnesti Mengkekalkan Kekebalan Hukum .....	16

La'ó Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste  
P.O. Box 340, Dili, Timor-Leste

Mobile +(670)7234330 Telepon +(670)3325013

Email: [info@laohamutuk.org](mailto:info@laohamutuk.org) Situs/Web: [www.laohamutuk.org](http://www.laohamutuk.org)

Dengan hancurnya institusi ini, Pemerintah dan (UNOTIL dan UNMIT) memulai proses penyaringan untuk mengevaluasi kembali semua anggota PNTL di seluruh Timor-Leste. Meskipun UNMIT (melalui UNPOL) memainkan peran penting dalam proses penyaringan, tetapi konsep ini telah dicetuskan sebelum UNMIT memulai misinya. Ide ini dimunculkan pada pertengahan 2006 oleh Polisi dari Australia, Portugal, Selandia Baru dan Malaysia yang sedang membantu Timor-Leste untuk merestorasi kembali hukum dengan berkonsultasi dengan Pemerintah Timor-Leste, Pasukan Stabilitas Internasional, Polisi UNOTIL (UNPOL) dan para penasihat internasional. Beberapa pertemuan teknis dan koordinasi telah diadakan. Dan pada bulan Agustus, Pemerintah Timor-Leste mengeluarkan Resolusi No.3/2006 sebagai dasar hukum dan gambaran proses penyaringan.

Sebagai tambahan untuk membantu memulihkan kepercayaan publik bagi PNTL, proses penyaringan dirancang untuk menjadikan PNTL sebagai institusi yang transparan dan bertanggung jawab, menghormati hukum yang ada, menghormati standar hukum pidana yang berlaku saat ini, standar pertanggungjawaban dan hak asasi manusia.

Pada tanggal 1 Desember 2006, UNMIT dan Pemerintah Timor-Leste menandatangani Perjanjian Tambahan untuk menegaskan peran UNPOL dan Pemerintah, terutama Kementerian Dalam Negeri. Perjanjian ini juga memberikan landasan hukum bagi proses-proses selanjutnya, yaitu reformasi, restrukturisasi dan pembangunan kembali PNTL.

## Bagaimana Proses Penyaringan ini Dilaksanakan?

Komisi Penyaringan dibentuk untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk kembali menjadi anggota PNTL dan siapa yang tidak. Proses penyaringan itu sendiri dilaksanakan dengan koordinasi antara Pasukan Stabilitas Internasional, para penasihat di Kementerian Dalam Negeri, UNPOL, dan Pemerintah Timor-Leste.

Resolusi No. 3/2006 membentuk tiga tim dengan fungsi dan tanggungjawab khusus. Tim Evaluasi beranggotakan perwakilan dari berbagai sektor dan memutuskan setiap anggota PNTL yang boleh diterima kembali. 10 anggota Tim Teknik (lihat tabel di bawah ini) dipilih melalui Dekrit Perdana Menteri No.11/2006, dikeluarkan pada tanggal 11 September 2006. Tim Sekretariat terdiri dari tiga orang yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Pemerintah Timor-Leste, yang menjadi prioritas utama dalam proses penyaringan adalah anggota PNTL Distrik Dili dan markas besar PNTL. Setelah itu, baru akan dilanjutkan dengan distrik-distrik lain, sebagaimana hingga pertengahan Juni, 30% dari anggota PNTL di Distrik telah disaring.

Anggota PNTL di Dili diharapkan mendaftarkan diri hingga tanggal 7 April 2007. Yang tidak mendaftarkan diri pada batas waktu tersebut, akan dianggap mengundurkan diri. Bagi yang mendaftarkan diri, Tim Teknis akan melakukan wawancara setiap orang dan mengecek informasi dari berbagai sumber untuk memastikan apakah yang bersangkutan telah terlibat dalam tindak kriminal atau tidak.

<b>Nama Tim</b>	<b>Anggota</b>	<b>Uraian Tugas</b>
<b>Tim Evaluasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil Menteri Dalam Negeri: José Agostinho Sequeira</li> <li>2. Wakil UNPOL</li> <li>3. Perwakilan Kejaksaan Agung: Ivo Valente.</li> <li>4. Anggota utusan Dewan Tertinggi Pertahanan dan Keamanan: Gustavo Mota</li> <li>5. Wakil Gereja: Elda Baptista Gomes H C</li> </ol>	Memiliki kewenangan untuk menentukan apakah masing-masing anggota PNTL dapat kembali ke institusi PNTL atau tidak, berdasarkan informasi yang diterima dari Tim Teknis. Tim ini memiliki hak suara.
<b>Pengamat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil dari Penasihat Perdana Menteri untuk Urusan HAM</li> <li>2. Wakil dari Unit HAM PBB</li> <li>3. Wakil dari Lembaga Non-Pemerintah</li> </ol>	Tim ini berpartisipasi dalam Tim Evaluasi, tetapi tidak memiliki hak suara.
<b>Kantor Pengawasan</b>		Kantor ini di bawah Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab untuk menginvestigasi para anggota PNTL yang melanggar standar-standar kedisiplinan.
<b>Tim Teknis</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penasihat Presiden: Carmelita Moniz</li> <li>2. Empat Utusan dari Kejaksaan Agung: Manuel Sarmento, Sergio Hornay, Olga Bareto Nunes dan Vicente Britos</li> <li>3. Utusan dari Kantor Inspektorat Jenderal: Francisco Pinto Carvalho</li> <li>4. Tiga perwakilan Lembaga Non-Pemerintah: Aniceto Neves, Rogerio Viegas Vicente dan Maria Agnes</li> <li>5. Dua orang akademis: Miguel Maia dos Santos dan Jose Antonio da Costa</li> <li>6. 20 orang anggota UNPOL</li> </ol>	Tim ini bertugas untuk melakukan studi terhadap CV dari semua anggota PNTL yang mendaftarkan diri untuk mengikuti proses penyaringan, melakukan studi dan menganalisa semua informasi dari berbagai pihak, mengumpulkan informasi dari para pemimpin masyarakat, mewawancarai anggota PNTL yang dievaluasi, menanyai para saksi, menyiapkan laporan tentang keterlibatan semua anggota PNTL dalam tindak pidana dan melanggar standar kedisiplinan. Semua informasi yang mereka peroleh diserahkan kepada Tim Evaluasi
<b>Tim Sekretariat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alipio José Vieira (Bombeiros)</li> <li>2. Cândido Gusmão (PNTL)</li> <li>3. Lidia Lopes de Carvalho (Kementerian Dalam Negeri)</li> </ol>	Tim ini bertugas untuk mengumumkan proses penyaringan terhadap anggota PNTL untuk publik, mengumpulkan informasi dari Kejaksaan Agung, Kantor Provedor, Penasihat HAM untuk Perdana Menteri, Unit HAM PBB, Polisi Internasional dan Pengadilan dan mendukung Tim Evaluasi melalui pengumpulan informasi. Tim Sekretariat juga menyediakan informasi kepada media.

Informasi yang dihimpun oleh Tim Teknis akan dianalisa oleh Tim Teknis dan diserahkan kepada Tim Evaluasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Tim Evaluasi, yang akan membuat keputusan bagi setiap anggota PNTL.

Proses evaluasi secara khusus memperhatikan tindakan anggota PNTL sebelum krisis, tindakan anggota PNTL selama krisis dan data kedisiplinan mereka sebelum krisis. Jika ada tuduhan bahwa anggota PNTL terlibat dalam tindak kejahatan sebelum atau selama krisis, tim akan merekomendasikan investigasi pidana lebih mendalam dan proses hukum resmi.

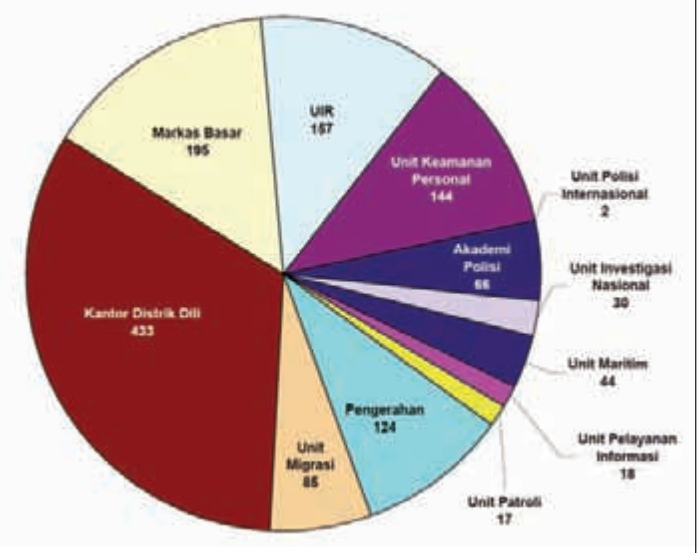
Untuk anggota PNTL yang tidak memiliki masalah indisipliner dan tidak terlibat dalam kegiatan kriminal, Tim Teknis merekomendasikan mereka mengikuti lima hari pelatihan akademi sebelum kembali bertugas. Setelah itu, para anggota PNTL memperoleh sertifikat sementara dari Kementerian Dalam Negeri dan kartu identitas dari UNPOL untuk tahapan selanjutnya, bimbingan di bawah pengawasan UNPOL.

Enam bulan selanjutnya, setiap anggota PNTL diarahkan dan dibimbing oleh UNPOL. Selama tahapan pendampingan dan pengawasan, Komisaris UNPOL akan mengidentifikasi para anggota PNTL yang gagal untuk memenuhi standar yang telah ditentukan, dan Kementerian Dalam Negeri tidak akan mengeluarkan sertifikat permanen bagi mereka. Jika, seorang anggota PNTL memenuhi standar, maka atas usulan Komisaris UNPOL, Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan sertifikat permanen yang berarti bahwa mereka telah lolos dari semua proses dan akan menjadi anggota tetap PNTL.

Menurut Tim Sekretariat, 1.242 PNTL yang terdaftar untuk proses penyaringan. Jumlah anggota PNTL di Distrik Dili sebelum krisis adalah 1.315 orang, jadi sekitar 70-an anggota yang mengundurkan diri atau gagal untuk mendaftarkan diri termasuk beberapa yang sudah beralih profesi. Di awal bulan April, 18 orang sudah pergi ke negara lain, tujuh orang dipenjara, dan tujuh orang berstatus buronan dengan Alfredo Reinaldo. Tiga orang, termasuk mantan Komandan Paulo Martins mengundurkan diri daripada mengikuti proses penyaringan. (Semua statistic dalam artikel ini adalah perkiraan terbaik yang kami bisa mengombinasikan data dari multiplikasi dan kontradiktif sumber. Data ini boleh tidak tepat dan berganti setiap waktu, tergantung dari siapa yang membuat perhitungan.)

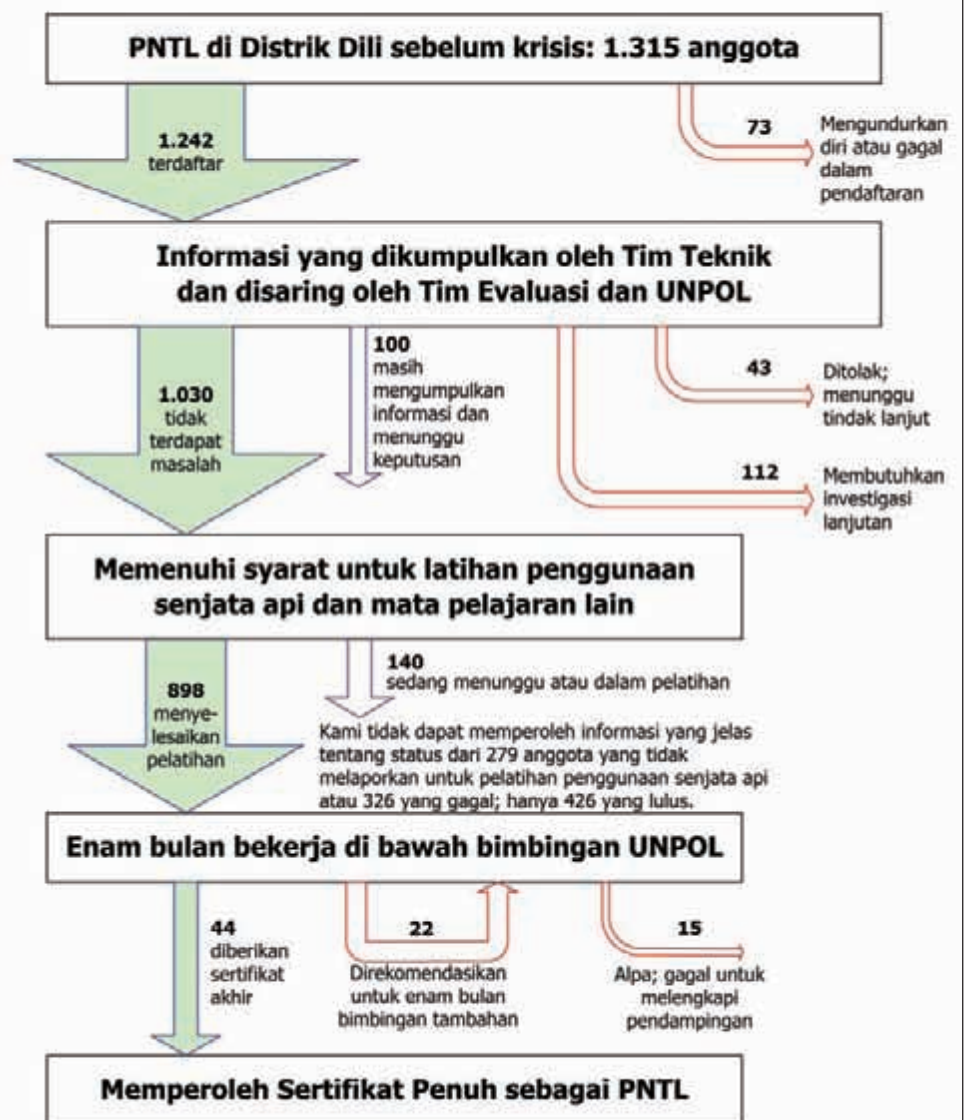
Dari 1.242 anggota PNTL yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti

**PNTL di Dili Sebelum krisis berdasarkan Unit**  
Total, 1.315 anggota



## Proses Penyaringan PNTL

Beberapa angka tidak sesuai karena inkonsistensi di dalam atau antara sumber informasi. *La'o Hamutuk* bermaksud mengilustrasikan situasi paling dekat pada awal Juni 2007, bukan jumlah yang detail.



Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Tim Teknik, Asosiasi HAK dan dokumen-dokumen UNMIT dan wawancara.

## Resolusi 1704 dalam hal Mandat UNMIT bagi Kepolisian

(c) Melalui kehadiran Polisi PBB, meyakinkan pemulihan dan menjaga keamanan publik di Timor-Leste dengan memberikan dukungan terhadap PNTL, ... termasuk penegakan hukum sementara dan keamanan publik hingga PNTL bertugas kembali, dan untuk membantu PNTL dengan pelatihan, pengembangan institusi dan memperkuat PNTL juga Kementerian Dalam Negeri...;

(e) untuk membantu Pemerintah RDTL melaksanakan peninjauan ulang yang komprehensif terhadap peran dan kebutuhan di masa depan di sektor keamanan, termasuk Falintil-Forças Armadas de Defesa Timor-Leste, Kementerian Pertahanan, PNTL dan Kementerian Dalam Negeri dengan alasan memberikan dukungan kepada Pemerintah, melalui nasihat-nasihat dan kerja sama dan juga berkoordinasi dengan mitra lain dalam memperkuat kemampuan institusi;

proses penyaringan, 44 telah menerima sertifikat final, lebih dari 800 orang yang mendapatkan sertifikat sementara dan menjalankan tugas di bawah dampingan UNPOL, sekitar 140 orang yang sedang dalam segala tahap pelatihan, 160 sedang dalam proses investigasi lanjutan karena kemungkinan persoalan yang telah muncul, sementara sekitar 100 orang yang telah dievaluasi dan sedang menunggu keputusan.

### Keterlibatan UNPOL dalam Proses Penyaringan PNTL

UNPOL memberikan informasi yang sangat berguna terhadap proses penyaringan sebelum UNMIT memulai misinya. Ketika UNMIT memulai misinya pada bulan September 2006, UNMIT mengutus seorang perwakilan dari UNPOL untuk bergabung dengan Tim Evaluasi dan 20 anggota UNPOL untuk mendukung Tim Teknis. UNPOL juga memberikan dukungan teknis, nasihat dan informasi untuk berlangsungnya proses penyaringan. Anggota PNTL yang telah melewati proses penyaringan juga akan berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari UNPOL.

Dengan lebih jauh melihat ke depan, berdasarkan Perjanjian Tambahan yang ditandatangani oleh pihak Pemerintah dan

UNMIT pada bulan Desember 2006, keterlibatan Polisi PBB tidak sebatas pada tahap penyeleksian. UNPOL akan memainkan peran yang lebih besar, yaitu memberikan komando kepada PNTL di seluruh distrik dan mendampingi para anggota PNTL yang telah lolos penyaringan. Selanjutnya, tugas dan tanggungjawab akan dialihkan dari Polisi PBB kepada PNTL. (Lihat daftar dibawah ini.)

### Beberapa Pengamatan

Meskipun pemerintah telah mengambil inisiatif untuk memulai proses penyaringan terhadap PNTL dengan nasihat dari Polisi Internasional dan UNPOL, namun resolusi No.3/2006 terbatas pada penyaringan ulang anggota PNTL, dan tidak termasuk persoalan-persoalan institusional yang dihadapi oleh PNTL. Menurut Komisi Investigasi Independen PBB 2006 dan lainnya, PNTL mempunyai masalah institusional sebagai tambahan dari masalah personel dan kedisiplinan. Ada beberapa bidang permasalahan, seperti rekrutmen dan pelatihan, pengawasan amunisi dan persenjataan, pengelompokan berdasarkan partai politik, politisasi, dan struktur komando yang terpadu.

Selama proses penyaringan, Tim Teknis mengandalkan informasi dari masyarakat, tetapi tidak ada mekanisme yang efektif bagi mereka untuk berpartisipasi, sehingga keterlibatan masyarakat sangat terbatas. Sebagai tambahan, beberapa korban dan saksi takut karena keamanan diri mereka sendiri, dan oleh karenanya mereka tidak memberikan informasi kepada Tim Teknis. Karena kelemahan sistem peradilan Timor-Leste, beberapa kasus belum di daftarkan ke pengadilan.

Resolusi Dewan Keamanan 1704 memberikan kekuasaan kepada UNPOL untuk mengambil alih pertanggungjawaban komando dan mengambil semua keputusan operasional terhadap PNTL, dengan Kementerian Dalam Negeri hanya bertanggungjawab pada administrasi dan manajemen PNTL. Pengambilalihan sementara ini perlu karena kepemimpinan markas besar PNTL pecah, namun ini perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik memahami pengambilalihan komando tersebut. Dari perspektif UNMIT, PNTL dan UNPOL adalah satu kekuatan, tetapi publik tidak mengerti siapa yang memberikan komando untuk seluruh operasional PNTL.

### Tahap Pendekatan Dukungan UNMIT bagi PNTL

Tahap	Deskripsi
Tahap Awal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNMIT mempunyai tanggungjawab utama untuk melaksanakan operasional polisi di seluruh Timor-Leste.</li> <li>2. Operasional Polisi dilaksanakan oleh para pejabat UNPOL dan PNTL yang mendapatkan sertifikat.</li> <li>3. Komisariss UNPOL memimpin keseluruhan komando dan mengontrol seluruh Timor-Leste, termasuk seluruh distrik dan unit-unitnya.</li> <li>4. UNMIT akan mempersiapkan calon pemegang komando PNTL untuk mengambil alih posisi komando dalam tahap Konsolidasi dan fase Penugasan Penuh berikutnya.</li> </ol>
Tahap Konsolidasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNMIT secara bertahap mengalihkan tanggungjawab operasional polisi di distrik-distrik dan unit-unitnya kepada PNTL, dengan berkonsultasi dengan Wakil Khusus Sekretaris Jendral dan bekerjasama dengan Pemerintah Timor-Leste.</li> <li>2. Setelah pengalihan tanggungjawab, PNTL mempunyai tanggungjawab utama untuk operasional polisi, sementara UNPOL melanjutkan memberikan nasihat, dukungan, dan bantuan.</li> <li>3. Keseluruhan komando tetap di bawah Komisariss UNPOL, termasuk di distrik-distrik dan unit-unitnya yang telah dialihkan kepada PNTL.</li> <li>4. Jika PNTL yang telah mendapatkan sertipikat yang telah dialihkan gagal untuk melaksanakan tanggungjawab mereka, UNPOL akan melakukan intervensi.</li> </ol>
Tahap Penugasan Penuh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UNMIT akan mengalihkan semua komando kepada PNTL, dengan rencana yang telah dipersiapkan untuk melanjutkan kerja sama UN bagi PNTL akan sukses di masa depan.</li> </ol>

## Dari Laporan Sekretaris Jendral PBB kepada Dewan Keamanan, Agustus 2006

59. Markas besar PNTL nasional dan distrik Dili pecah setelah kekerasan yang terjadi pada bulan April dan Mei, juga Unit Polisi Khusus di distrik Bobonaro, Aileu dan Baucau. Sejumlah PNTL di markas besar dan pemegang komando juga anggota Unit Polisi Khusus terlibat dalam kekerasan. Misi Penilaian Awal melakukan peninjauan ulang yang komprehensif terhadap struktur dan tindakan PNTL di seluruh wilayah dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab pelanggaran penegakan hukum, terutama di Dili, dan wilayah-wilayah yang kurang mendapatkan layanan dari PNTL.

60. Peninjauan ulang tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa, sejak 2002 kemajuan yang nyata telah dibuat dalam kapasitas kepolisian Timor-Leste, namun masih ada kelemahan, terutama dalam aspek-aspek operasional kepolisian, kerangka kerja institusional PNTL. Kementerian Dalam Negeri tidak hanya mengabaikan pengembangan institusi PNTL tetapi gagal untuk membangun kemampuan kementerian itu sendiri, terutama gagal dalam pembuatan kebijakan, pembuatan anggaran dan legislatif, dan secara teratur melakukan intervensi dalam kegiatan-kegiatan kepolisian di semua tingkatan, termasuk dalam operasional dan pengambilan keputusan bagi personel. Kementerian seringkali melakukan intervensi secara sewenang-wenang dalam hal tindak kedisiplinan, rekrutmen dan kenaikan pangkat. Penyalahgunaan sistem kenaikan pangkat mengakibatkan PNTL menjadi organisasi yang di tingkat atas, dengan daya kritis yang rendah di tengah-tengah, dan tingkat manajemen yang lebih rendah. Lebih jauh lagi, Kementerian memperoleh persenjataan, terutama senjata laras panjang, tanpa kedisiplinan terhadap kebutuhan sebuah kebijakan yang berlaku dan tidak mengelola keamanan senjata-senjata tersebut dengan sepatutnya dan pembagian dilakukan tanpa mempertimbangkan keamanan.

61. Kelemahan administrasi dan organisasional PNTL digabungkan dengan intervensi politik yang berulang-ulang oleh Kementerian Dalam Negeri telah berdampak serius terhadap seluruh keefektifan, profesionalisme, dan kredibilitas kepolisian nasional. Ketentuan mengenai bantuan internasional terhadap PNTL sejak 1999, meskipun penting, tetapi tidak dikordinasikan dengan cukup dan tidak disesuaikan dengan dukungan terhadap pengembangan institusi PNTL dalam jangka panjang. Bantuan pengembangan selanjutnya diperlukan dalam bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perbekalan/prokuremen, persediaan dan pemeliharaan, sistem komunikasi dan manajemen. Sebagai tambahan, struktur organisasi di markas besar kepolisian telah menjadi sangat rumit dan pendirian beberapa unit polisi khusus telah mengurangi penyediaan sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan umum dan kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.

Keterlibatan berbagai institusi dalam proses ini telah menimbulkan beberapa persoalan; *La' o Hamutuk* menghadapi kesulitan untuk memperoleh informasi yang konsisten, terkini atau lengkap; Seringkali nampak bahwa aktor yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda mengenai bagaimana proses ini atau peran mereka dalam proses ini. Kelihatannya jelas bahwa UNPOL dan Pemerintah tidak memiliki koordinasi yang baik; UNPOL telah menjalankan proses terpisah dari yang dijalankan oleh Pemerintah. Meskipun kedua pihak telah menggabungkan proses ini, tetapi kami dan publik tetap bingung terhadap proses ini; karena kurangnya informasi yang jelas dan juga informasi yang kontradiktif. *La' o Hamutuk* dan peneliti lain terkejut dengan keengganan dari pihak PBB dan Pemerintah untuk membuka informasi tentang berbagai aspek dari proses ini, dan mengapa orang yang seharusnya mengerti gambaran umum tentang proses ini enggan menjelaskan masalah ini secara detail dan akurat.

Proses penyaringan itu sendiri menghadapi tantangan seperti absen; dimana anggota PNTL tidak hadir pada kursus pelatihan, tidak hadir di tempat yang telah diutuskan dalam waktu yang tepat. Meskipun aturan PNTL tidak mengizinkan anggota untuk absen, tetapi UNPOL memberikan sertifikat kepada anggota PNTL yang belum menyelesaikan pelatihan.

Selain itu, standar yang ditaati dalam tahap penyaringan dan pendampingan seringkali tidak jelas, tidak konsisten dan tidak transparan, baik itu dalam Kementerian maupun UNPOL. Ini menyulitkan anggota polisi, yang terlibat dalam proses penyaringan dan juga untuk institusi itu sendiri. Ini juga menyulitkan bagi publik untuk menerima legitimasi dari proses rekonstitusi institusi polisi.

Lebih jauh lagi, penyampaian informasi yang baik harus disediakan bagi masyarakat umum untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap PNTL. Meskipun Resolusi No.3 sendiri menekankan partisipasi dari komunitas,

namun rendah dalam implementasinya. Beberapa tokoh masyarakat mengatakan kepada *La' o Hamutuk* bahwa mereka hanya mendengar proses penyaringan tersebut dari media massa. Konsekuensinya, para tokoh masyarakat dan publik tidak terlibat banyak dalam proses penyaringan.

Berbagai persoalan tambahan dapat dilihat dalam proses pelatihan. Pelatihan, penyaringan ulang dan proses pendampingan. Sebagai contoh, 27% dari yang diwajibkan untuk menghadiri pelatihan penggunaan senjata tidak hadir; dari jumlah yang mengikuti, 44% gagal dalam pelatihan, meskipun pelatih UNPOL sudah menurunkan standarnya "sebisanya mungkin untuk memenuhi level kelulusan."

Informasi terakhir yang kami bisa dapat bahwa 81 anggota PNTL telah melengkapi pendampingan selama enam bulan dengan UNPOL. Dari jumlah ini, 15 tidak diterima karena absen, sementara 22 orang akan melanjutkan enam bulan pendampingan. Hanya 44 anggota yang sudah mendapat sertifikat final sebagai anggota PNTL. Mempertimbangkan bahwa semuanya adalah anggota PNTL sebelum April 2006, ini jelas bahwa baik itu pengembangan individual maupun institusional dari PNTL tidak berada ditempat yang seharusnya.

Jika Timor-Leste ingin kembali pada demokrasi yang damai, didasarkan pada tujuan dan perwujudan negara berdasarkan hukum secara efektif, integritas para individual dan institusi yang terlibat dalam penegakan hukum sangatlah penting. Proses penyaringan PNTL dan tahap transisi dari UNPOL kepada PNTL merupakan langkah penting, tetapi yang lebih penting adalah kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum secara setara dan adil bagi semua warga negara. *La' o Hamutuk* mendorong mereka yang terlibat di dalam proses ini untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat umum, dan untuk merespon kelemahan institusi PNTL dengan keseriusan yang sama dengan apa yang telah dilaksanakan dalam proses penyaringan setiap individu PNTL. ❖

# Menstrukturkan Kembali Peraturan Perminyakan di Timor-Leste

Seperti yang seringkali ditulis oleh *La'o Hamutuk*, pembangunan bidang perminyakan merupakan salah satu elemen paling penting dari masa depan Timor-Leste. Jika pembangunan dalam bidang perminyakan ini berjalan dengan baik, akan memberikan devisa dan pembangunan terhadap negara kita, tetapi jika dikerjakan dengan ceroboh akan mengakibatkan “kutukan sumber daya alam” bagi generasi sekarang dan masa depan. Jumlah uang yang terlibat dan potensial terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sangatlah tinggi sehingga transparansi dan pertanggungjawaban penting jika rakyat Timor-Leste memperoleh keuntungan dari sumber daya alam minyak kita.

Pemerintah Timor-Leste menstrukturkan kembali peraturan di sektor perminyakan, termasuk mendirikan perusahaan minyak nasional PETROTIL Timor-Leste. Sebagai tambahan, Otoritas Rancangan Laut Timor (TSDA) akan bergabung dengan *Direcção Nacional do Petróleo e Gás – DNPG* untuk menjadi satu badan dari pemerintah Timor-Leste. Sebuah Dewan Nasional untuk Kebijakan Energi akan melihat secara keseluruhan badan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan baru, juga membuat kebijakan nasional Timor-Leste (generasi, impor dan pendistribusian ke pemakai lokal dan pembeli internasional). Perundang-undangan juga mengimplementasikan perubahan-perubahan lain yang melibatkan pembuatan peraturan dan kebijakan bagi sektor perminyakan. Semua badan-badan pemerintah dan fungsi-fungsinya didirikan oleh perundang-undangan baru masih di bawah Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi.

Sejak September 2006 Pemerintah juga telah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tertutup mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan, termasuk di dalam Dewan Menteri. Pertentangan pendapat internal pemerintah menunda pengesahan peraturan-peraturan yang diusulkan, khususnya perdebatan mengenai model Brazil sebagai model yang cocok bagi Timor-Leste atau tidak. Beberapa pejabat mengatakan akan ada studi oleh para ahli independen, juga informasi bagi publik dan konsultasi dengan publik sebelum perundang-undangan yang sulit dijangkau tersebut disahkan, dan perundang-undangan ini seharusnya tidak dinyatakan berlaku tanpa persetujuan Parlemen.

Pada akhir Maret 2007, Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi mengedarkan tiga usulan undang-undang untuk dikonsultasikan dengan publik selama 15 hari. Ketiga usulan undang-undang ini mencakup sektor energi, dari eksplorasi dan produksi (*upstream*) hingga transportasi, penyimpanan, pengilangan, distribusi dan pemasaran (*downstream*). Ketiga usulan undang-undang ini lebih luas cakupannya dari Undang-Undang Perminyakan Timor-Leste 2005 dan Kode Pertambangan Perminyakan JPDA, yang hanya mencakup aktivitas-aktivitas *upstream*. Konstruksi proyek-proyek *downstream* dan beroperasinya perusahaan minyak nasional akan melibatkan milyaran dollar dalam investasi, devisa, dan penggunaan uangnya. Aktivitas-aktivitas dengan milyaran dollar tersebut tanpa perhatian khusus atas transparansi, pendapat-pendapat yang independen, dan

kontrol yang seimbang, rentan terhadap korupsi dan kronisme.

Perundang-undangan baru yang mendasar seperti ini harus mensyaratkan kewenangan Parlemen sesuai Pasal 95 dan 96 Konstitusi RDTL, dan legalitas pengimplementasiannya oleh *Decreitu Lei* tanpa persetujuan Parlemen pantas dipertanyakan.

Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi menaruh *Decreitu Lei* dan penjelasannya di internet dan meminta komentar sebelum 5 April 2007. *La'o Hamutuk* mengajukan analisa awalnya, dan selanjutnya secara tidak resmi diberitahu mengenai perpanjangan batas akhir pengajuan usulan. Tetapi, beberapa pejabat pemerintah sekarang ini masih berharap untuk ketiga undang-undang ini sebelum pemilihan Parlemen yang akan datang.

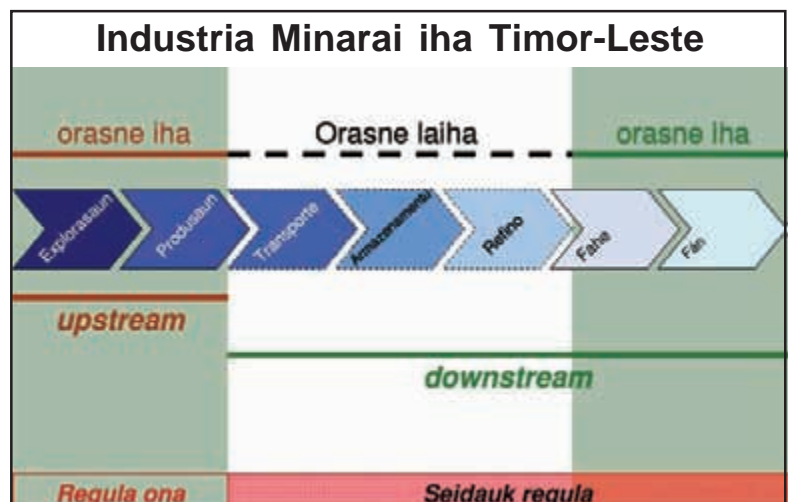
Dalam ringkasannya, ketiga *Decreitu Lei* akan:

- ◆ Mengkombinasikan TSDA dan *Direcção Nacional do Petróleo e Gás* ke dalam *Autoridade Reguladora Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ARNP* yang baru.

TSDA didirikan pada 2002 oleh Perjanjian Laut Timor antara Australia dan Timor-Leste sebagai sebuah agen kedua-pemerintah untuk mengawasi proyek-proyek *upstream* minyak dan gas di Wilayah Pengembangan Perminyakan Bersama (JPDA), termasuk Bayu-Undan, Elang-Kakatua dan sebagian Greater Sunrise. Perjanjian Laut Timor menetapkan TSDA akan mejadi bagian dari Pemerintah RDTL pada bulan April 2006. Kedua negara setuju untuk menundanya hingga 2 Juli 2007, dan bisa diperpanjang lebih lama, sehingga tidak perlu mengundangkan perundang-undangan baru dengan terburu-buru.

Perundang-undangan yang diusulkan untuk menggantikan TSDA dengan *Autoridade Reguladora Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis* (ARNP) yang akan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengelola proyek-proyek *upstream* dan *downstream* di kedua wilayah, JPDA dan wilayah lepas pantai eksklusif dan daratan Timor-Leste. ARNP yang baru juga akan mengambilalih fungsi-fungsi *Direcção Nacional do Petróleo e Gás* (DNPG).

ARNP akan menjadi *instituto publico* administratif, beroperasi di bawah Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi (lihat bagan), dan Komisi Bersama JPDA (yang melibatkan satu anggota, masing-masing dari Aus-



tralia dan Timor-Leste). Semua anggota ARNP diangkat oleh Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi.

Sebagai tambahan mengontrakkkan operasional dan pengaturan aktivitas-aktivitas upstream dan downstream, ARNP akan mengatur dan mengawasi semua kegiatan berkaitan dengan persediaan bahan bakar nasional, termasuk bio-diesel dan bio-fuels dan juga minyak dan gas alam. Menurut makalah kerja, semua perundang-undangan diperlukan untuk mengimplementasikan ARNP akan disahkan pada 1 April 2007.

#### ◆ Mendirikan *Conselho Nacional de Política Energética* - CNPE

Sebuah *Conselho Nacional de Política Energética* didirikan oleh paket perundang-undangan ini. *Conselho Nacional* ini akan menjadi badan penasihat, dengan semua pertanggungjawaban atas ARNP, termasuk menyetujui anggaran ARNP. Seperti ARNP, CNPE di bawah Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi. CNPE akan membuat kebijakan-kebijakan bagi Timor-Leste mengenai produksi, pemakaian, dan pendistribusian energi. Normalnya CNPE akan mengadakan pertemuan dua kali setahun dan mempunyai 9 anggota, termasuk empat menteri dan wakil-wakil masyarakat sipil dan Dewan Konsultasi Dana Perminyakan. Masyarakat dengan keahlian mengenai perminyakan dari universitas-universitas dan sektor swasta juga akan dilibatkan.

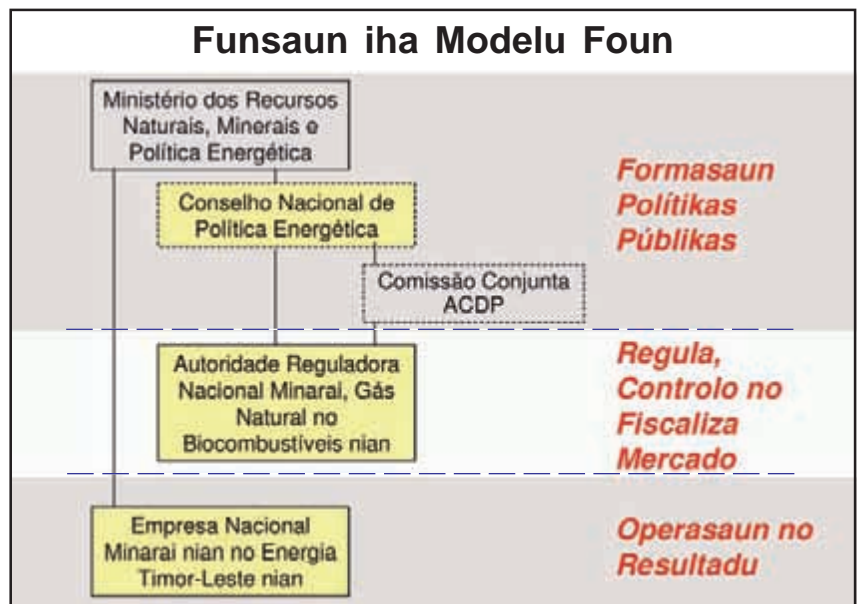
#### ◆ Mendirikan *Empresa Nacional de Petróleo, Gás e Energia de Timor-Leste* - PETROTIL

Statuta ini mewujudkan berdirinya perusahaan minyak milik negara (nasional) sebagaimana dicita-citakan di dalam Undang-Undang Perminyakan 2005. PETROTIL, di bawah Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi, dapat berpartisipasi dalam semua aspek eksplorasi di upstream dan downstream, lepas pantai dan daratan, juga produksi dan pendistribusian nasional dan internasional.

#### Konsultasi Publik

Ketiga draf *decreitu lei* hanya tersedia dalam bahasa Portugis dan waktunya sangat pendek. *La'ó Hamutuk* dan lainnya memprotes “konsultasi” tidak dirancang untuk menerima masukan dari publik. Dewan Konsultasi Dana Perminyakan menulis kepada Kementerian, dan Koalisi NGO mengenai Transparansi mengadakan konferensi pers, keberatan terhadap proses pembahasan *decreitu lei* tersebut. *La'ó Hamutuk* mengajukan kesaksian sebanyak sembilan halaman kepada Pemerintah; dari yang lain, hanya Jaksa Joseph Bell dari *Revenue Watch* yang menulis masukan penting. Poin-poin utama masukan dari *La'ó Hamutuk* adalah:

- ◆ Dalam masukan awal ini, kami hanya mendiskusikan isu-isu umum. Waktu, bahasa, dan media yang digunakan untuk konsultasi publik tidak memungkinkan konsultasi publik mendapatkan masukan yang berarti dari masyarakat Timor-Leste atau ahli-ahli dari luar negeri, dan konsultasi seharusnya diperpanjang atau diadakan lagi. *La'ó Hamutuk*, setelah meminta nasihat dari para ahli internasional, akan memberikan sebuah analisa, bagian-per bagian, jika



rancangan perundang-perundangan menyediakan waktu yang lebih lama. Topik-topik yang dicakup oleh ketiga undang-undang ini sangat penting untuk menentukan apakah Timor-Leste akan menderita atau menyelamatkan diri dari “kutukan sumber daya alam,” dan mereka lebih mempertimbangkan dengan hati-hati dan komunikasi dua-arah untuk mengimplementasikan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi, bahwa “setiap warga negara berhak atas kehidupan berpolitik dan kepentingan umum negara.”

- ◆ Perundang-undangan utama seharusnya tidak disahkan selama krisis sosial dan politik atau semata-mata sebelum pemilihan umum nasional. Tidak ada alasan *decreitu lei* ini perlu disetujui dengan terburu-buru, dan sebuah pemerintah baru yang terpilih dapat memutuskan untuk menggantikannya. Pengesahan ketiga undang-undang ini seharusnya ditunda hingga masyarakat mempunyai waktu dan informasi untuk fokus kepada mereka. Banyak undang-undang yang penting – seperti UU Pensiun, ratifikasi CMATS, Amnesti dan Wajib Militer – telah disetujui saat masyarakat sibuk dengan krisis, hal ini meremehkan prinsip-prinsip demokrasi.
- ◆ Rancangan undang-undang ini meliputi topik-topik yang belum pernah didiskusikan di Parlemen. Ini seharusnya tidak di berlakukan sebagai *decreitu lei*, dimana tidak dikirim ke Parlemen. Secara legal dan etika, Perusahaan Minyak Nasional dan peraturan mengenai aktifitas downstream harus berdasarkan undang-undang yang diberlakukan oleh anggota Parlemen kita yang dipilih dalam sesi terbuka, tidak hanya dalam rapat rahasianya Dewan Menteri.
- ◆ Rancangan undang-undang ini memprioritaskan uang untuk mengedepankan industri minyak daripada kebutuhan dan hak masyarakat kita, dan dirancang untuk menguntungkan para pelaku bisnis dan masyarakat di negara-negara kaya, seperti menguntungkan para pihak yang berkepentingan dari para perusahaan minyak internasional, daripada warga negara Timor-Leste. Beberapa ketentuan melindungi para pelaku ekonomi, tanpa audiensi publik yang akan melindungi rakyat kita.
- ◆ Jika disahkan, *decreitu lei* ini akan membahayakan lingkungan alam kita. CNPE didominasi oleh orang-orang dengan keahlian perminyakan, yang akan menyulitkan

Timor-Leste untuk mencari pilihan-pilihan bagi energi alternatif. Rancangan *decreitu lei* tidak mencantumkan pemeliharaan lingkungan, dan CNPE akan memprioritaskan jenis bahan bakar melalui proses pembakaran daripada menggunakan sumber daya alam yang bersih, dapat diperbaharui, sumber-sumber daya alam yang berkelanjutan seperti angin, energi solar, gelombang pasang air laut, ombak dan kedalaman laut.

- ◆ Rancangan undang-undang ini secara luas memusatkan kekuasaan di Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi. Ini menambah resiko korupsi, menyalahgunakan kekuasaan dan pelanggaran administrasi. Kekuasaan yang besar dari CNPE didefinisikan secara luas. Penempatan kebijakan energi dan perusahaan minyak nasional di bawah arahan orang-orang yang sama, bertanggungjawab untuk memastikan mengalirnya devisa dari minyak (lebih dari 90 persen dari pendapatan pemerintah) merupakan konflik struktural yang akan mengurangi prioritas atas keprihatian terhadap non-devisa. Tidak ada ketentuan-ketentuan yang ada untuk menyeimbangkan informasi, pendapat-pendapat yang independen, atau mendorong pertimbangan-pertimbangan atas isu-isu yang sangat penting yang bisa mengganggu mengalirnya devisa.
- ◆ Rancangan undang-undang ini gagal secara keseluruhan untuk menjalankan komitmen pemerintah atas transparansi dan pertanggungjawaban (termasuk Inisiatif Transparansi Industri Bahan Baku / EITI), dan dapat meremehkan langkah-langkah yang telah ada untuk mengesahkan prinsip-prinsip ini. Rancangan *decreitu lei* ini akan mengizinkan konflik-konflik kepentingan yang ada dan hampir tidak adanya pengaman terhadap korupsi.
- ◆ ARNP melanggar Undang-Undang Dana Perminyakan 2005 yang mensyaratkan semua devisa pemerintah dari aktivitas-aktivitas perminyakan akan didepositokan langsung ke dalam Dana Perminyakan.
- ◆ Secara prinsip, *La'o Hamutuk* mendukung perusahaan-perusahaan minyak nasional, tetapi perusahaan minyak nasional akan membawa dampak juga keuntungan, karena mereka tidak bertanggungjawab kepada investor luar negeri, pemerintah lain, atau peraturan-peraturan bursa efek. Anggaran dasar PETROTIL yang diusulkan tidak mensyaratkan transparansi atau perlindungan terhadap bahaya-bahaya ini. Di negara-negara lain, seperti Ekuador dan Nigeria, perusahaan-perusahaan minyak nasional telah membuktikan lemahnya tanggungjawab mereka dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta asing, dan juga seringkali melanggar hak asasi manusia dan lingkungan, atau terlibat dalam korupsi.

Di pertengahan April, *La'o Hamutuk* mendapatkan informasi secara informal bahwa Pemerintah menerima rekomendasi kami untuk didiskusikan lebih lanjut, dan masukan-masukan yang akan datang selanjutnya akan diterima. Beberapa pejabat Timor-Leste dan penasehat-penasehat, mengatakan kepada *La'o Hamutuk* bahwa mereka menghargai masukan kami, karena masukan kami mendorong mereka untuk melakukan proses yang lebih terbuka selama diskusi-diskusi internal.

*La'o Hamutuk* terus melakukan analisis pada rancangan undang-undang ini dan akan membuat masukan yang lebih rinci. Selama periode yang sama, seorang ahli ekonomi Martin Sandbu, Bank Dunia dan yang lainnya banyak menyuarakan kekwatiran kami, dimana anggota masyarakat sipil juga mempertanyakannya pada Menteri Jose Teixeira yang diselenggarakan oleh *Luta Hamutuk* pada 1 Juni.

Sebagaimana kita memasuki analisis kami, *La'o Hamutuk* telah kuatir dengan statute PETROTIL yang mana mengizinkan anggota dewan penasehatnya untuk membagikan keuntungan PETROTIL diantara mereka. Sebagai tambahan, ini juga adalah melanggar Undang-undang Dana Perminyakan, ini juga menutup pintu untuk mencuri sumber daya umum untuk kepentingan pribadi. Jika PETROTIL adalah milik Negara dan rakyat Timor-Leste, maka pendapatannya harus masuk ke bendahara publik, tidak ke beberapa individu yang diseleksi oleh Menteri untuk Sumber Daya Alam.

Akan tetapi, setelah kekalahan Fretilin dalam pemilihan presiden babak kedua, kelihatannya beberapa orang di Pemerintah mencoba meminta Dewan Menteri untuk mengesahkan rancangan undang-undang ini secepat mungkin. Untungnya ini tidak terjadi, dan timnya Kementerian yang merancang sedang memperbaiki undang-undang ini berdasarkan masukan-masukan yang diterima selama ini, dan versi yang baru diharapkan akan tersedia pada bulan Juli.

Dengan dukungan dari Oxfam dan Revenue Watch Institute, *La'o Hamutuk* telah menerjemahkan rancangan undang-undang ini ke dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia untuk memperluas kesadaran publik, dan kami mendorong masyarakat umum Timor-Leste dan masyarakat internasional yang memberikan dukungan kepada masyarakat Timor-Leste untuk mengajukan pandangan-pandangan mereka secepatnya kepada Kementerian Sumber Daya Alam, Mineral, dan Kebijakan Energi ke kantor mereka di Gedung Fomento atau melalui email ke [mnrmp@bigpond.com](mailto:mnrmp@bigpond.com).

Untuk informasi lebih jauh, terjemahan dan komentar terdapat di

[www.laohamutuk.org/Oil/PetRegime/Restruct/07RestructIndex.htm](http://www.laohamutuk.org/Oil/PetRegime/Restruct/07RestructIndex.htm)

dan mungkin juga terdapat di

<http://www.timor-leste.gov.tl/EMRD/pcpa.asp> . ❖

## Dengarkan Program Radio "I qualidade" La'o Hamutuk

Wawancara dan komentar mengenai isu-isu penting yang kami pantau!

Setiap Minggu pada jam 1:00 siang di Radio Timor-Leste



# Perencanaan Strategis: Aliansi Nasional Timor-Leste untuk Pengadilan Internasional

Aliansi Nasional Timor Leste untuk Pengadilan Internasional (ANTI), merupakan sebuah jaringan yang terdiri dari mahasiswa, organisasi nonpemerintah, keluarga korban dan individu-individu yang mempunyai perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Timor-Leste selama pendudukan Indonesia. Aliansi dibentuk pada bulan Juli 2002 dan telah menyampaikan kritik terhadap proses peradilan yang dijalankan oleh Pemerintahan Transisi PBB (seperti Unit Kejahatan Berat) dan Pengadilan Ad-Hoc Indonesia di Jakarta. Selama ini, tidak ada tanggapan yang efektif terhadap tuntutan keadilan rakyat Timor-Leste, dan khususnya para korban.

Hampir lima tahun ANTI telah melakukan advokasi isu keadilan. Akan tetapi jalan menuju keadilan masih panjang dan masih membutuhkan perjuangan. Pada tanggal 20-22 Maret, ANTI melakukan perencanaan strategis di Sekretariat Forum ONG, dihadiri oleh 52 orang. ANTI mengevaluasi kegiatannya selama dua tahun belakangan ini dan membuat perencanaan strategis dua tahun demi memperkuat gerakan

terhadap terciptanya keadilan, dengan sebuah rencana kerja untuk membuatnya efektif.

Kegiatan-kegiatan yang dievaluasi, diantaranya diskusi-diskusi, pelatihan dan dialog, seminar, serta kegiatan-kegiatan lain di seluruh Timor-Leste. ANTI mengundang nara sumber dari Procurador Geral, STP-CAVR, JSMP, dan Asosiasi HAK; juga ahli dari Australia, James Dunn. Ada beberapa kesempatan bagi wakil korban dari distrik untuk menyampaikan pertanyaan dan komentar.

Semua peserta berkomitmen untuk tetap memperjuangkan keadilan bagi korban di Timor-Leste dan masyarakat di seluruh dunia. Perencanaan memilih tujuh orang anggota dewan untuk dua tahun ke depan, termasuk tiga mewakili keluarga korban, dua organisasi mahasiswa, dan dua dari ONG nasional. *La' o Hamutuk* bagian dari dewan dan menerima tanggungjawab membangun hubungan dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia dan keadilan, dan membangun solidaritas dengan mereka. ❖

## Janji Keadilan yang Belum Terpenuhi

Pada 29 Maret 2007, *La' o Hamutuk* mengorganisir sebuah diskusi publik di Aula UNTL di Dili. Pembicaraannya antara lain Wakil Sekretaris Jendral UNMIT Bpk Eric Tan, Wakil Kejaksaan Agung Ivo Valente, Parlemen Nasional Elizario Ferreira (FRETILIN), Edio Saldanha dari Aliansi Nasional untuk Pengadilan Internasional, dan Direktur Departemen Politik UNMIT Colin Stewart. Para pembicara mendiskusikan upaya-upaya yang dilakukan untuk keadilan terhadap perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan selama 24 tahun yang terjadi di Timor-Leste.

*La' o Hamutuk* menyelenggarakan program ini untuk membangun kembali perhatian publik terhadap kebutuhan keadilan atas kejahatan di masa Indonesia, yang menurun sejak krisis tahun lalu. Pertemuan tersebut mendiskusikan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh institusi-institusi untuk mengadili para pelaku yang hingga saat ini masih menikmati kekebalan hukum.

Sejak tahun 2000 sampai saat ini, telah banyak mekanisme yang telah dicoba untuk meminta pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diantaranya Panel Special dan Unit Kejahatan Berat (Unit Crimes Graves) di Dili, Pengadilan Ad Hoc HAM di Jakarta dan Komisi Ahli yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Banyak komisi telah memberikan rekomendasi, namun tak satu pun yang berhasil menanggapi tuntutan keadilan para korban, keluarga korban dan masyarakat Timor-Leste.

Dalam presentasinya, Ivo Valente menyatakan Kejaksaan Agung Timor-Leste tidak memiliki kemampuan untuk mengadili para aktor dan pelaku kejahatan di Indonesia maupun Timor-Leste karena belum ada perjanjian ekstradisi (penyerahan para tersangka tindak kejahatan) antara kedua negara.

Sementara itu, perwakilan PBB Eric Tan mengatakan bahwa PBB mengakui kerja Panel Spesial belum selesai dan

selama ini UNMIT telah mendukung Kejaksaan Agung untuk melanjutkan investigasi terhadap kasus kejahatan Berat (Unit Crimes Graves) didirikan kembali

untuk melakukan investigasi (tapi tidak untuk menghukum) kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999 saja. Colin Stewart, yang pernah menjadi staf UNAMET dan UNTAET, menggambarkan ketidakmampuan PBB untuk mencegah Pemerintah Indonesia mendukung tindak kejahatan di Timor-Leste pada tahun 1999, bahkan saat itu PBB mengetahui apa yang akan terjadi. Anggota Parlemen Elizario Ferreira menjelaskan bahwa Parlemen telah membentuk Komisi Eventual untuk melakukan analisa terhadap laporan Komisi Investigasi Independen mengenai krisis yang terjadi selama April hingga Mei 2006. Komisi Eventual menyampaikan laporannya kepada Parlemen pada bulan Desember.

Edio Saldanha, mewakili organisasi masyarakat sipil, menyampaikan perspektifnya mengenai laporan Komisi Ahli dan Laporan Akhir CAVR, yang keduanya tidak ada tindak lanjutnya. Dia juga meminta kepada Parlemen Nasional untuk meninjau kembali Undang-Undang Amnesti, (Undang-Undang tentang Pemberian Pengampunan) dan merekomendasikan agar pemberian pengampunan/amnesti hanya dapat diberikan jika pelaku kejahatan telah menyelesaikan proses peradilan. ❖



Colin Stewart dan Edio Saldanha

# Timor-Leste Kehilangan Kedaulatan untuk 50 Tahun

Awal tahun ini organ legislatif dari Australia dan Timor-Leste telah meratifikasi dua perjanjian tentang Laut Timor, yaitu perjanjian *Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea* (CMATS) dan Perjanjian Penyatuan Internasional (*International Unitization Agreement*) untuk Greater Sunrise. Perjanjian CMATS telah ditandatangani oleh Menteri luar negeri kedua negara pada tanggal 12 Januari 2006 namun baru dibawa ke Parlemen pada awal tahun ini. Sementara Perjanjian Penyatuan Internasional ditandatangani pada tahun 2003, namun Pemerintah Timor-Leste tidak pernah menyerahkannya kepada Parlemen Timor-Leste sehingga memaksa kedua pihak untuk memulai negosiasi baru hingga tahun 2005.

## Di Timor-Leste

Di Dili, ratifikasi terhadap kedua perjanjian ini berjalan begitu tertutup, tanpa ada sebuah konsultasi publik terhadap isu nasional yang sangat penting ini. *La'o Hamutuk* menulis kepada Parlemen Nasional Timor-Leste pada bulan Maret 2006 dan Januari 2007, mengusulkan agar kedua negara perlu memperbaiki perjanjian ini sebelum diratifikasi. Namun submisi tidak dihiraukan dan Parlemen merugikan kepentingan nasional kita dengan meratifikasi perjanjian ini pada tanggal 20 Februari 2007. (Baca *Buletin La'o Hamutuk* Vol.7, No.1 April 2006 untuk analisis lebih detail dari perjanjian CMATS).

Parlemen juga telah mengklaim bahwa mereka tidak akan memberikan setetes milik Timor dari Laut Timor kepada pihak asing. Namun dengan peratifikasian perjanjian CMATS oleh Parlemen bertentangan dengan posisi Parlemen, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS*) yang telah disahkan Oktober 2002.

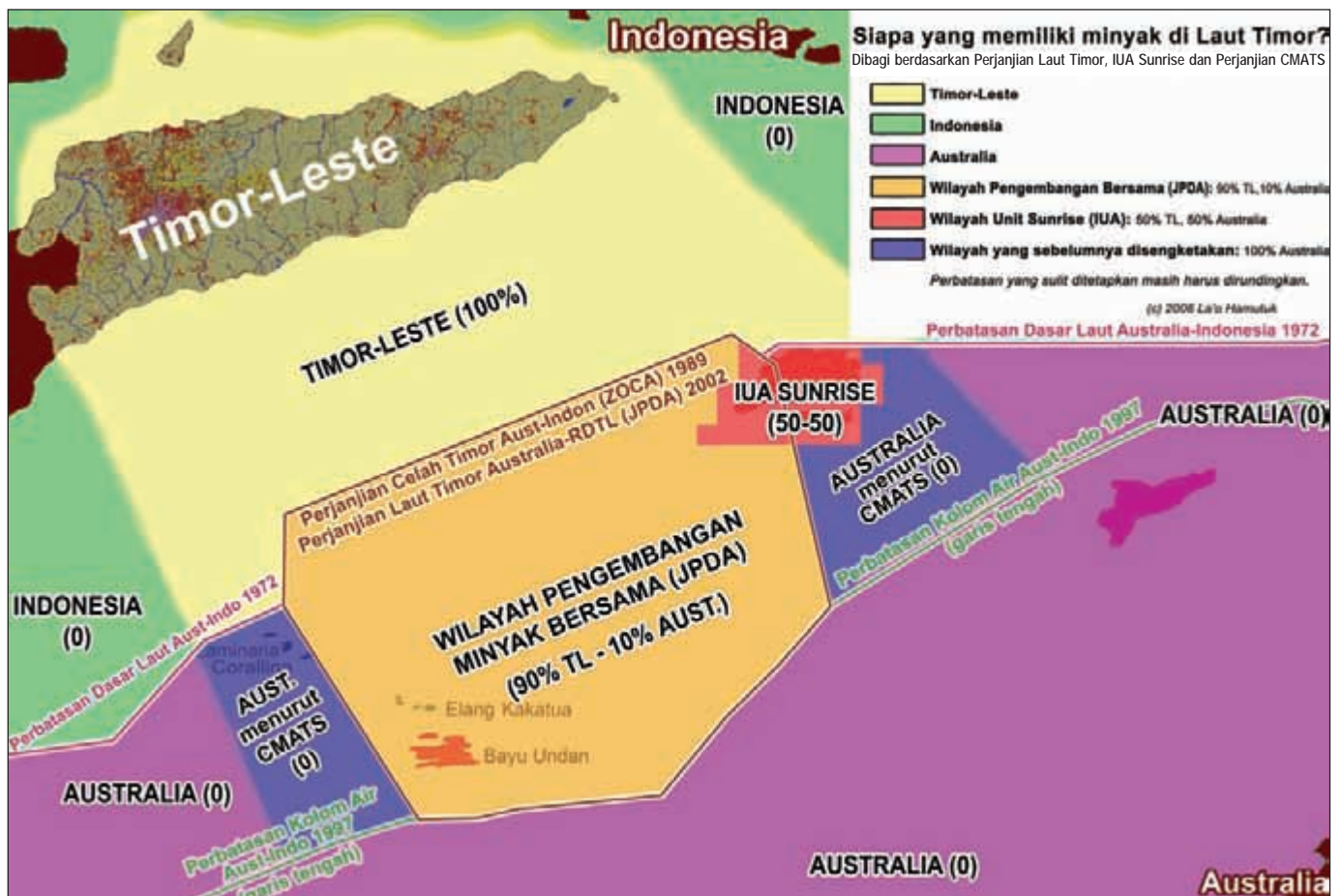
Proses ratifikasi terhadap perjanjian ini mendapat perhatian

yang sangat sedikit dari publik karena krisis yang melanda Timor-Leste sejak tahun lalu. Artinya isu yang merupakan salah satu faktor kunci dalam perjuangan kita melengkapai kemerdekaan ini berlalu begitu saja tanpa sebuah diskusi publik yang seharusnya dilakukan, layaknya sebuah negara demokrasi.

## Di Australia

Pada tanggal 7 Februari 2007 Pemerintah Australia mengajukan perjanjian ini kepada Parlemen dan *Joint Standing Committee* untuk dipelajari. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Australia juga mengajukan penjelasan kepentingan nasionalnya (*National Interest Analysis*) yang di dalamnya terdapat fakta yang tidak benar dan logika yang rancu.

Walaupun Parlemen Australia melakukan dengar pendapat baik secara lisan maupun tertulis, tetapi ini hanya formalitas belaka. Pada tanggal 23 Februari 2007, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengumumkan bahwa perjanjian ini mulai berlaku sebelum Parlemen meratifikasinya, Sebuah permintaan "Pengecualian Kepentingan Nasional" Australia dalam proses legislasi normal. Downer menulis kepada Komite Perjanjian Parlemen bahwa "Ini adalah sebuah kesempatan untuk meratifikasi CMATS dan Perjanjian Penyatuan Internasional sebelum pemilu presiden dan parlemen mendatang." Secara jelas Australia sedang mengeksploitasi krisis yang terjadi di TL, tidak melihat pemilu yang berlangsung di sini sebagai sebuah mekanisme untuk perubahan demokratis dan damai, tetapi sebagai sebuah ancaman bagi ambisinya di Laut Timor. Dalam sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi modern, sangat mengejutkan ketika parlemen terpilih bersedia untuk tidak dihiraukan.



*La' o Hamutuk* dengan organisasi lain seperti *East Timor and Indonesia Action Network* (ETAN), *Timor Sea Justice Campaign* (TSJC), serta organisasi dan individu lain yang tertarik dengan isu ini memasukkan submisi kepada Parlemen Australia. *La' o Hamutuk* mengakui bahwa Parlemen Australia harus melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi meminta agar Parlemen Australia mendengar suara dari masyarakat lain dan mempertimbangkan perspektif legal dan moral yang akan memperkuat kepentingan Australia. Ini penting bagi Australia demi menjaga kredibilitas Australia sebagai sebuah negara yang demokratis, menghormati aturan hukum, dan kedaulatan negara tetangganya.

Perjanjian CMATS lebih baik daripada yang telah ditawarkan oleh Australia pada tahun 2004 karena meningkatkan pendapatan upstream TL dari 42% menjadi 60% dari semua ladang minyak dan gas yang seharusnya menjadi milik Timor-Leste berdasarkan prinsip hukum internasional.

Australia menduduki ladang minyak lain dari bagian TL dalam Laut Timor, termasuk Laminaria-Corallina dan Buffalo, dan juga ladang lain yang ditemukan di masa mendatang.

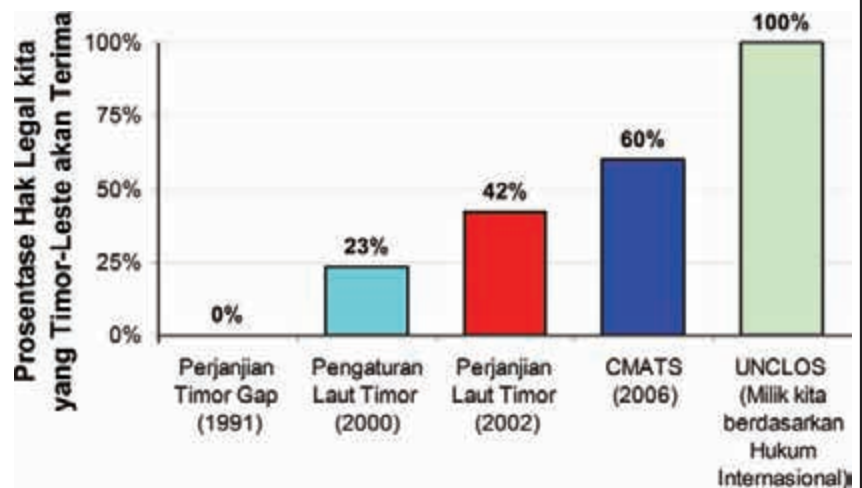
Meskipun peningkatan pembagian hasil pendapatan dari *upstream* penting, tetapi perjanjian ini dapat mengurangi kerugian TL jika dinegosiasi lebih lanjut. Seharusnya ini tidak diberlakukan secara paksa selama krisis, sebelum pemilu di kedua negara.

Berdasarkan CMATS, Australia tetap mempertahankan kekuasaan yang besar untuk menentukan rencana pengembangan ladang Greater Sunrise, yang harus disahkan dalam waktu enam tahun agar perjanjian ini tetap berlaku. Jika Timor-Leste gagal meyakinkan Perusahaan Minyak Woodside dan Pemerintah Australia untuk membawa pipeline ke Timor-Leste, TL akan lebih rugi lagi. LNG plant di Timor-Leste akan menjadi sebuah proyek industri besar, akan memberikan pendapatan pajak dari proses downstream, dan kesempatan untuk meningkatkan bagian lain dari ekonomi kita. Juga proyek ini akan membantu integrasi negara kita ke dalam pembangunan minyak dan gas di kawasan ini, termasuk ladang lain di Timor-Leste, Indonesia dan perairan Australia.

CMATS adalah hasil dari sebuah proses yang tidak adil dan bertujuan untuk menjawab kepentingan para perusahaan minyak internasional dan Pemerintah Australia. Penundaan masalah batas laut untuk 50 tahun, adalah pertimbangan komersial, bahwa minyak dan gas di laut Timor akan habis tereskplotasi sesudahnya. Dan perjanjian ini memberikan stabilitas fiskal dan legal yang menjadi tuntutan Woodside untuk mengembangkan Greater Sunrise secepatnya, meskipun tidak jelas bahwa pengembangan Greater Sunrise secepatnya adalah kepentingan Timor-Leste.

Meskipun masyarakat dari semua dunia selama ini telah mendukung tuntutan rakyat Timor-Leste untuk batas laut demi melengkapi perjuangan kemerdekaan kita, namun Pemerintah Australia menolak untuk menjawab permintaan ini. dan lebih berkeinginan untuk bernegosiasi mengenai pembagian keuntungan. Australia lebih memiliki untuk bernegosiasi mengenai pembangunan pendapatan daripada mengakui kedaulatan kita. Tidak adanya kemauan baik Pemerintah Aus-

## Perolehan Timor-Leste terhadap Kekayaan Minyak dan Gas berdasarkan berbagai susunan perjanjian



Grafik ini termasuk lahan yang diketahui 100% milik Timor-Leste berdasarkan Hukum Internasional: Bayu-Undan, Elang-Kakatua, Greater Sunrise, Laminaria-Corallina dan Buffalo.

tralia untuk bernegosiasi secara adil dengan tetangga barunya dengan mengabaikan suara masyarakat sipil dari kedua pihak tentang Laut Timor, menimbulkan pertanyaan tentang demokrasi Australia.

### Penjelasan Terhadap Kepentingan Nasional Australia

Pemerintah Australia menyerahkan sebuah analisis kepada Parlemennya tentang kepentingan nasionalnya berkaitan dengan CMATS. Menurut analisis mereka “adalah kepentingan Australia untuk menciptakan stabilitas legal untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan minyak di Laut Timor antara Timor-Leste dan Australia tanpa melanggar klaim atas batas laut.”

*La' o Hamutuk* juga setuju dengan analisis yang mengatakan bahwa stabilitas ekonomi Timor-Leste merupakan kepentingan terbaik Australia. Tetapi dengan mengambil 50% dari Greater Sunrise dan mengokupasi lahan lain di Laut Timor adalah tindakan yang sangat bertentangan. Stabilitas ekonomi di Timor-Leste bisa dicapai dengan mengakui kedaulatan kami dan memberikan kesempatan agar kami memperoleh manfaat dari dari semua proses pengembangan kekayaan kami, daripada hanya menerima kas. Ini sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi Timor-Leste.

Australia menjustifikasi posisinya dengan mengatakan bahwa Australia telah membantu Timor-Leste sejak tahun 1999, tetapi bantuan Australia selama periode itu totalnya kurang dari \$1.400 juta yang telah diambil oleh Pemerintah Australia dari ladang Laminaria-Corallina.

### Kesimpulan

CMATS adalah hasil dari sebuah proses yang tidak adil, dan Australia telah menunjukkan ketidakhormatannya untuk demokrasi di kedua negara dan untuk kemerdekaan nasional kita. Berdasarkan perjanjian ini, Australia memiliki 50 tahun untuk mengeksplorasi ladang lain di Laut Timor di masa mendatang, ketika kita dilarang untuk mencari batas laut atau menggunakan arbitrase pihak ketiga. Timor-Leste menyerahkan kedaultannya untuk 50 tahun, sampai semua minyak dan gas di Laut Timor sudah habis terkuras dan terjual. ❖

## Kejahatan-kejahatan apa saja yang akan menerima amnesti dibawah undang-undang ini

(Lihat editorial, halaman 16)

Status Hukum	Deskripsi	Kondisi dan pengecualian
KUHP* 55	Amnesti dapat diberikan kepada keduanya entah itu keterlibatan langsung seseorang dalam kejahatan atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kejahatan.	Dalam 90 hari, pelaku harus membayar reparasi kepada korban, kecuali si korban menarik kembali komplain atau memberikan pengampunan kepada salah satu co-pelakunya
KUHP 351-361	Penyerangan, penyiksaan, perlakuan kejam, kelalaian atau kealpaan, pembunuhan, penyiksaan (termasuk yang berakibat meninggal)	Pembunuhan yang direncanakan tidak termasuk.
KUHP 362-395	Pencuri, pemerasan, perampokan, pembokaran, pengelapan, penyipuan	Pelaku harus membayar reparasi kepada korban, kecuali pihak korban menarik kembali komplainnya untuk memberikan pengampunan. Jika nilai dari harta benda yang di curi atau dirusak lebih dari \$10.000, maka amnesti tidak diijinan
KUHP 104-129	Hasutan, percobaan pembunuhan pada kepala negara, penghianatan, subversi, pemberontakan, konspirasi, untuk terlibat dalam salah satu kasus ini, kolosi dengan petolongan musuh, mengimport senjata untuk mendukung revolusi, mata-mata	
KUHP 154-177	Mengekspresikan permusuhan melawan pemerintah, melanggar simbol-simbol nasional, menghasut kebencian etnik, mendorong untuk kekerasan atau ketidaktaatan, penyalahgunaan, merusak dan memusnahkan, asosiasi kriminal, kerusuhan, ancaman mengganggu perdamaian, mengejek para pelayan religius	Tidak ada amnesti apabila kejahatan dilakukan <u>melalui</u> media
KUHP 207-241	Penghinaan aparat publik, mengancam pegawai publik, pemaksaan, memberontak, tidak mematuhi perintah pejabat, salah melaporkan kejahatan, membantu pelarian dari penjara, tidak mematuhi permintaan pengadilan, melanggar perintah pengadilan, peniruan	Tidak ada amnesti, apabila kejahatan yang dilakukan <u>melalui</u> media
KUHP 310-321	Penghinaan, penistaan, fitnah, pencemaran nama baik	Tidak ada amnesti apabila yang melakukan <u>adalah</u> media
Reg. UNTAET 2001/12 (Kode Disiplin Militar) pasal 4-12	Perlakuan tidak baik pada anggota F-FDTL, tingkah laku yang tidak beraturan, pembangkakan terhadap perintah, tidak mematuhi perintah, alpa tanpa cuti	Hanya berlaku untuk anggota F-FDTL
Reg. UNTAET 2001/5 pasal 1-7	Barang milik, import, membuat, menggunakan, membeli atau menjual senjata api illegal, amunisi atau bahan peledak.	Senjata harus dimatikan dalam sebulan ketika Undang-undang Amnesti diberlakukan Anggota PNTL dan FDTL sudah dibebaskan dari undang-undang ini jika mereka sedang melakukan tugasnya dan berhubungan dengan komando dan instruksi
* KUHP adalah Kode Penal Indonesia 1999, dimana masih berlaku di Timor-Leste karena RDTL belum memberlakukan punyanya sendiri.		

(bersambung ke halaman 13)

**Kejahatan-kejahatan apa saja yang akan menerima amnesti** *(lanjutan hari halaman 12)*

*(Lihat editorial, halaman 16)*

Status Hukum	Deskripsi	Kondisi dan pengecualian
KUHP 187-206	Pembakaran rumah dengan sengaja, kepemilikan akan barang peledak, mencegah luapan api hingga tidak terkontrol, merugikan atau mensabotase sistem kerjanya air minum, sistem kelistrikan, perahu, bangunan atau jalan raya	Diberikan jika bukan material, atau pelaku personal yang langsung membunuh, dan yang mencuri atau merusak harta benda atau yang harganya kurang dari \$10.000
KUHP 155	Mengekspresikan kebencian kepada pemerintah	
	Semua kejahatan yang dilakukan karena kelalaian atau secara tidak langsung (melalui mendukung orang lain untuk melakukannya) tidak, jika tidak ini semua di kenakan dengan undang-undang ini.	Tidak jelas apakah ini mengesampingkan pembatasan \$10.000 diatas.
	Semua kejahatan yang dilakukan karena kelalaian melawan anggota keluarga, atau dimana korban menjamin pengampunan.	
RDTL Peraturan pemerintah 6/2003	Lalu lintas dan pelanggaran parkir, berpindah pada kekerasan.	Kecuali untuk pengemudi yang sedang mabuk atau meninggalkan tempat kecelakaan
	Pelanggaran yang dapat dihukum dengan denda kurang dari \$500 atau membatalkan sampai dengan \$2.000	Kecuali untuk kebiasaan tertentu, keuangan dan pelanggaran perbankan
Undang-undang RDTL, peraturan pemerintah dan peraturan	Kesalahan disiplin dengan hukuman maksimum tidak lebih daripada penskorsans	Kecuali dimana ada implikasi secara tidak langsung terhadap kejahatan atau dakwaan yang sudah diberikan sanksi yang lebih serius
	Polisi dan militer menlaggar kedisiplinan	Kecuali jika dapat dihukum dengan sanksi yang lebih tinggi daripada hukuman penjara
Pos-penghukuman pengampunan	Untuk semua kasus yang dilakukan antara tanggal 20 April 2006 dan 30 April 2007, semua denda akan dibatalkan, kecuali kalau denda itu lebih dai 180 hari diimplementasikan sebagai pengganti dari penjara akan di kurangi dengan satu tahun, kecuali bahwa hukuman yang 8 tahun atau lebih akan di kurangi menjadi satu-enam	Kecuali dimana ada pemalsuan dokumen, kekerasan seksual terhadap korban yang dibawah umur 14 tahun. Semua kejahatan yang hukumannya lebih dari 10 tahun atau orang yang sudah menerima pardon sebelumnya tidak memenuhi syarat.
Tidak dapat dipilih		Kebiasaan minum alkohol dan nakal/jahat tidak pantas untuk menerima amnesti.
Pengurangan hukuman	Hukuman untuk kesalahan yang dilakukan sebelum 31 Juli 2006, dapat dihukum kurang dari 3 tahun penjara, dapat juga digantikan dengan denda	Hanya diterapkan pada pelaku dibawa umur 18 atau lebih 59 tahun yang tidak melakukan kejahatan lain.
Kejahatan-kejahatan yang diulangi	Amnesti atau pengampunan dibatalkan jika pelaku terlibat dalam kesalahan jahat dalam tiga tahun setelah undang-undang ini dibelakukan	

# Editorial: Undang-undang Amnesti mengkekalkan Kekebalan Hukum

(Lanjutan hari halaman 16)

tahun 1975. kebiasaan kekebalan ini telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi masalah keamanan yang terjadi sejak tahun lalu dan berlanjut hingga hari ini. Kami masih menunggu keadilan bagi pembunuhan pada 4 Desember 2002, untuk 37 orang yang dibunuh pada April dan May 2006, dan untuk lebih dari 100 orang yang meninggal akibat kekerasan sejak itu. Kapan itu akan berhenti?

Anggota Parlemen yang mempertahankan undang-undang ini mengatakan bahwa undang-undang ini bermaksud membersihkan kasus-kasus yang bertumpuk di sistem pengadilan. Mereka berargumentasi, dengan undang-undang semacam ini, sehingga pengadilan bisa lebih fokus pada kasus-kasus yang besar. Menurut bapak Elizario Ferreira, anggota Parlemen Nasional, bahwa pemimpin yang baik seharusnya mempunyai kemampuan untuk memberikan pengampunan pada warga negaranya yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan kecil. Dia mengatakan bahwa undang-undang amnesti ini akan memberikan kebebasan kepada orang-orang miskin dan lemah yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kuasa hukum atau pengacara, dan akan memperbolehkan pengadilan untuk fokus pada kejahatan-kejahatan serius.

Tetapi, *La' o Hamutuk* tidak melihat ini sebagai suatu alasan untuk meloloskan undang-undang ini. Lebih baik Parlemen dan institusi-institusi negara lainnya seharusnya memperkuat dan memperbaiki sistem peradilan di negeri ini. Negara harus menyediakan pembela umum untuk mereka yang tidak mempunyai uang, sehingga mereka dan semua orang dapat bertanggung jawab pada kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Proses peradilan seharusnya berjalan dengan sesungguhnya dan secara efisiensi, sehingga negara itu sendiri tidak melakukan pelanggaran pada hak asasi manusia dengan membiarkan pelaku didalam penjara tanpa kepastian sebelum mereka dibawa ke pengadilan untuk diinvestigasi.

Dalam beberapa hari ketika undang-undang ini diloloskan oleh Parlemen, pengacaranya mantan Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato (sekarang ini sedang melakukan masa tahanan penjara selama 7 tahun), meminta kepada Jaksa Agung untuk menjamin dia dengan amnesti. Hal ini jelas menunjukkan bahwa undang-undang ini tidak hanya untuk kejahatan kecil, tetapi memberikan kekebalan hukum kepada mereka yang memimpin negara ini hingga krisis.

Undang-undang ini mengimplementasikan cara pandang yang tidak adil akan masyarakat. Seseorang yang membakar rumahnya orang-orang yang kaya (dimana harganya lebih dari \$10,000) harus melalui keadilan, tetapi mereka yang membakar rumah yang dibawah harga rata-rata akan menerima amnesti. Hal ini bertentangan dengan tujuan fundamental dari Konstitusi Negara "untuk mempromosikan pembangunan masyarakat berdasarkan keadilan sosial," dan juga prinsip Konstitusi bahwa "tidak ada seorangpun dapat mengalami diskriminasi berdasarkan alasan warna kulit ... status sosial dan ekonomi..." selama berabad-abad Timor-Leste telah menjadi korban dari politik dan ekonomi global dimana negara-negara kaya melanggar hak-hak dan kekayaan dari negara-negara miskin karena kekebalan hukum. Kita

seharusnya tidak mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu untuk melawan warganegara kita sendiri.

*La' o Hamutuk* dan masyarakat madani lainnya seringkali bertanya kepada Parlemen untuk tidak membuat undang-undang untuk mengkriminalkan aksi-aksi tanpa kekerasan yang seharusnya di lindungi oleh hak-hak asasi manusia yang secara internasional dan konstitusional dijamin. Maksud kami adalah undang-undang defamasi/penistaan dan undang-undang imigrasi, undang-undang demonstrasi dan undang-undang lainnya yang akan menambah beban sistem pengadilan dan penjara dengan kasus-kasus yang tidak perlu, dan juga melanggar konstitusi dan hak asasi manusia. Tetapi Parlemen dan Pemerintah meloloskan banyak dari undang-undang tersebut. Tetapi sekarang, beberapa di Parlemen telah memutuskan bahwa beberapa dari undang-undang tersebut, dan juga lainnya sebagai tindak kejahatan, tidak harus dikenakan pada orang-orang tertentu dan selama periode tertentu.

Masyarakat yang berdasarkan hukum membutuhkan praktek-praktek yang konsisten dan penggunaan universal, tujuan fundamental adalah terdapat dalam Konstitusi Timor-Leste: "untuk menjamin dan memajukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi warga negara serta kehormatan bagi asas-asas Negara demokratis yang berdasarkan kekuatan hukum." Memberlakukan undang-undang yang berlebihan, dan kemudian memutuskan secara seleksi untuk tidak memperkuatnya, adalah tidak ada gunanya untuk mendemonstrasikan nilai-nilai ini.

Krisis nasional kita hanya akan berakhir jika orang-orang bisa percaya bahwa kekuatan hukum diimplementasikan secara adil dan merata, menyediakan stabilitas, kepercayaan dan keadilan untuk semua orang. Jika para pelaku tidak bertanggungjawab pada tindakan-tindakan mereka, kami akan takut terus menerus, akan kehilangan hidup dan harta benda kami. Di negara yang hukumnya lemah, pelanggaran hak asasi manusia dan mencegah kekerasan, stabilitas dan pembangunan, membawa kita pada kemiskinan, kriminalitas dan pelanggaran hukum. Kurangnya pertanggungjawaban untuk kejahatan-kejahatan masa lalu akan membawa ke lebih banyak lagi kejahatan di masa datang.

## Memberikan ijin kepada kriminal untuk mengulangi tindak kejahatan-kejahatan mereka

Ini sangat ironik dan sedih karena para pemimpin kita yang meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengirimkan Komisi Investigasi Independen (KII) tahun lalu dan sekarang tidak rela untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh KII, yang mana meliputi penuntutan 68 orang nama dan investigasi lebih lanjut pada lebih dari 70 orang lainnya. Seperti yang simpulkan oleh Komisi: "Komisi sadar bahwa ada keinginan besar sekali dari masyarakat untuk mendapatkan keadilan, dimana harus dipenuhi melalui sistem pengadilan yang adil, efisiensi, dan dapat dipercaya. Komisi melihat bahwa keadilan, perdamaian dan demokrasi secara dewasa memperkuat kekuasaan. Jika perdamaian dan demokrasi dimajukan, keadilan pasti tampak efektif."

Undang-undang ini mengizinkan para pelaku yang dibawah umur 18 tahun dan diatas 59 tahun untuk membayar denda daripada menjalankan masa tahanan di penjara. Hal ini mendukung para pemuda yang melakukan kriminal untuk mengulangi kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan, karena denda lebih mudah daripada pergi ke penjara. Kami tahu bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan para pemuda, ini semua dikarenakan pengangguran, sehingga beberapa pemuda yang menganggur digunakan oleh aktor-aktor politik. Anak-anak dan pemuda rentan akan manipulasi seperti itu, dan kami setuju bahwa mereka tidak seharusnya dikirim ke penjara. Meski demikian membayar denda juga tidak tepat, tanpa mendidik mereka untuk menghargai hak orang lain akan keselamatan, keamanan dan hidup. Lebih dari itu, denda akan membuat mereka rentan pada orang-orang yang memiliki uang dan membayar mereka untuk melakukan kejahatan lagi.

Sejauh ini, Timor-Leste belum memiliki pengadilan khusus atau mekanisme legal untuk memproses pelaku-pelaku yang masih sangat muda, dan kami mendorong Parlemen Nasional dan Pemerintah untuk menciptakan satu. Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah untuk mendirikan pusat rehabilitasi untuk para pemuda dan anak-anak, untuk memfasilitasi pendidikan mereka sehingga mereka dapat memperbaiki tingkah laku mereka. Ini juga akan membantu menyembuhkan para korban, jika tidak, rasa sakit hati dan kebencian di antara orang akan berlanjut, dan ini akan menciptakan lingkaran balas dendam dan membuat keadilan di Timor-Leste akan lebih sulit untuk capai.

#### **Parlemen tidak konsisten dan tidak mewakili**

Parlemen Nasional seharusnya mewakili semua warga negara kita. Pasal 92 Konstitusi kita mengatakan bahwa "Parlemen Nasional adalah lembaga kedaulatan Republik Demokrasi Timor-Leste yang mewakili semua warga negara Timor-Leste dan diberikan wewenang legislatif, pengawasan dan pengambilan keputusan politik." Tetapi, undang-undang Amnesti ini menunjukkan bahwa Parlemen kadang-kadang mewakili para pelaku kejahatan saja, daripada semua orang.

Sebuah undang-undang yang menyumbangkan keadilan adalah tidak pernah tepat, tetapi khususnya ini adalah waktu yang buruk untuk sebuah undang-undang dimana akan merusak harapan dari banyak orang yang telah bekerja untuk keadilan. Di tengah-tengah musim pemilihan umum kebanyakan orang, termasuk anggota Parlemen, fokus pada kampanye dan tidak memberikan perhatian pada pekerjaan mereka atau kepada keinginan rakyat. Lebih jauh dari itu, Parlemen meloloskan undang-undang ini kurang dari satu bulan sebelum mereka meninggalkan kantor, mengurangi demokrasi Timor-Leste dan membuat kita untuk percaya bahwa mereka tidak ingin mengizinkan anggota Parlemen baru yang akan dipilih untuk memperkuat keadilan.

Sayangnya, beberapa dari anggota Parlemen kami mempunyai memori yang lemah. Pada 9 Desember 2006, Komisi Ad Hoc (Komisaun Iventual) Parlemen untuk mempelajari Laporan Komisi Investigasi Independen PBB untuk Timor-Leste, yang mana meliputi beberapa pelaku dalam Undang-undang Amnesti ini, dalam laporannya bahwa:

*"Komisi Ad Hoc yakin bahwa Timor-Leste berbagi pemikiran yang universal sehubungan dengan 'keadilan, perdamaian dan demokrasi tidak bertujuan secara dewasa, tetapi secara dewasa memperkuat kekuasaan.' Komisi Ad Hoc juga berpendapat bahwa masyarakat Timor-Leste membela dan berjuang supaya bisa ada akhir dari kekebalan hukum.*

*"Komisi Ad Hoc berpendapat bahwa telah sangat diperlukan dan mendesak untuk mengejar jalan kecil rekonsiliasi politik, sosial, dan moral, dan untuk mendukung semua inisiatif yang berhubungan dengan itu, rekonsiliasi tidak dapat membatasi bahkan menghalangi masalah keadilan dan memberantas kekebalan hukum. Para pelaku tindak kejahatan harus bertanggungjawab dan dibawa ke pengadilan."*

*La'o Hamutuk* berharap bahwa Presiden akan mengingat kata-kata bijaksana ini, meskipun Parlemen telah melupakannya. ❖

## **Siapa di La'o Hamutuk?**

**Staf La'o Hamutuk:** Shona Hawkes, Yasinta Lujina, Inês Martins, Guteriano Neves, Charles Scheiner, Santana Soares, Maximus Tahu

**Penerjemah:** Selma Hayati, Nugroho Kacasungkana, Douglas Kammen, Pamela Sexton, Andrew de Sousa

**Dewan Penasehat:** Joseph Nevins, Pamela Sexton, Adérito de Jesus Soares, Justino da Silva, Oscar da Silva

Pada 4 Juni 2007, Parlemen Nasional Timor-Leste meloloskan Undang-undang no. 35/I/5a berjudul “Kebenaran dan Tindakan Pengampunan untuk Berbagai Pelanggaran.” Ketika artikel ini ditulis, undang-undang ini sedang berada di meja Presiden Jose Ramos-Horta, menunggu untuk di sebarluaskan atau veto. Undang-undang ini buruk untuk keadilan dan atau untuk rakyat kita, dan akan memperpanjang kebebasan dari hukuman dan memastikan pembagian politik dan masyarakat yang telah membawa kita pada krisis sekarang ini. *La’o Hamutuk* mendesak Presiden baru untuk memveto Undang-undang ini.

Undang-undang ini akan diberlakukan pada kejahatan-kejahatan sepanjang tahun lalu, dimana telah memakan nyawa banyak orang dan menyebabkan banyak orang yang kehilangan rumah dan tempat tinggal mereka. Banyak perempuan yang telah menjadi janda dan anak-anak menjadi piatu. Ketika undang-undang ini diloloskan masih terdapat banyak kesalahan dalam penulisan, dimana ini menunjukkan bahwa Parlemen tidak benar-benar memberikan perhatian pada undang-undang ini – Parlemen FRETILIN ingin memberlakukan undang-undang ini dengan buru-buru sebelum pemilihan Parlemen baru datang. *La’o Hamutuk* dan yang lainnya prihatin bahwa jika Undang-undang ini diberlakukan, akan membawa kemunduran bagi sistem peradilan di Timor-Leste.

Undang-undang ini memberikan pengampunan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan serius di Timor-Leste antara tanggal 20 April 2006 sampai 30 April 2007. Para Pelaku berbagai kejahatan tanpa harus datang ke pemeriksaan pengadilan atau melalui proses pengadilan apa saja untuk menerima amnesti. Undang-undang ini menyebutkan lebih dari 180 kejahatan-kejahatan khusus yang akan mendapatkan amnesti (lihat tabel, halaman 12). Untuk beberapa dari mereka, korban dari kejahatan bisa menerima ganti rugi dan harus memberikan ijin untuk mendapatkan pengampunan.

Sekarang ini, banyak orang Timor-Leste meninggal karena kejahatan-kejahatan tersebut. Ribuan orang yang lain sudah lebih dari setahun tinggal di kampung pengungsi, dan bahkan banyak anak-anak yang pendidikan mereka telah terganggu, menghancurkan masa depan mereka. Undang-undang ini mempedulikan mereka yang terlibat dalam kejahatan-kejahatan, tetapi tidak mempertimbangkan penderitaan dari orang-orang sipil yang tidak tahu apa-apa akibat tindakan mereka.

Walaupun undang-undang ini berjudul “Kebenaran dan Tindakan Pengampunan untuk Berbagai Pelanggaran,” kami tidak menemukan sebuah kebenaran didalamnya. Dalam mukadimah menjelaskan mengenai pentingnya mencari kebenaran, tetapi undang-undang ini tidak memasukan proses pencarian, kesaksian, dengar pendapat umum atau mekanisme lain dimana bisa menemukan kebenaran. Mungkin ini adalah cerita keberhasilan logik untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan, yang mana proses “kebenaran” hanya melayani untuk mempublikasikan pelayanan pribadi dari para pelaku saja, penjumlahan yang tidak akurat dari tindakan mereka yang terjadi selama 1999.

### Melanggar Konstitusi untuk Kekebalan Hukum

Ayat pertama Konstitusi Timor-Leste mengatakan bahwa negara Timor-Leste adalah berdasarkan kekuasaan hukum, keinginan rakyat dan kehormatan atas martabat manusia.” Tetapi undang-undang ini melanggar pasal itu, memberikan amnesti dan pengampunan tanpa berdasarkan keadilan. Konstitusi pasal 16 menyatakan bahwa “semua warga negara adalah sama di depan hukum, memiliki hak yang sama dan tunduk pada kewajiban yang sama. Oleh karena itu undang-undang amnesti ini seharusnya tidak hanya untuk melindungi beberapa pelaku tanpa menghargai hak dari para korban.

Timor-Leste memasuki lingkaran kekebalan hukum yang kekal, dimana ini melemahkan peranan hukum dalam memberikan keadilan untuk menangkis kejahatan-kejahatan di masa depan. Tidak pernah ada keadilan pada hampir semua kejahatan yang telah membunuh lebih dari seribuan orang disini di tahun 1999, membiarkan sekitar ratusan ribu sejak

(bersambung ke halaman 14)

### Apakah La’o Hamutuk itu?

*La’o Hamutuk* (Berjalan Bersama) adalah sebuah organisasi Timor-Leste yang memantau, menganalisis, dan melaporkan tentang kegiatan-kegiatan institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa’e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial negeri ini. *La’o Hamutuk* berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Leste harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses ini dan bahwa proses ini harus demokratis dan transparan. *La’o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi rakyat Timor-Leste yang efektif. Selain itu, *La’o Hamutuk* bekerja untuk meningkatkan komunikasi antara masyarakat internasional dengan masyarakat Timor-Leste. Staf *La’o Hamutuk* baik itu staf Timor-Leste maupun internasional mempunyai tanggungjawab yang sama dan memperoleh gaji. Terakhir, *La’o Hamutuk* merupakan pusat informasi, yang menyediakan berbagai bahan bacaan tentang model-model, pengalaman-pengalaman, dan praktek-praktek pembangunan, serta memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor-Leste dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model-model pembangunan alternatif.

*La’o Hamutuk* mempersilakan kepada mereka yang ingin menyalin kembali buletin atau foto yang ada dalam buletin dengan gratis. *Buletin* dan foto yang disalin harus tetap mencantumkan nama *La’o Hamutuk* sebagai sumber utamanya.

*Dalam semangat mengembangkan transparansi, La’o Hamutuk mengharapkan anda menghubungi kami jika mempunyai dokumen dan atau informasi yang harus mendapatkan perhatian rakyat Timor-Leste serta masyarakat internasional.*